



BBPSI SDLP

LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)



Balai Besar Pengujian Standar Instrumen
Sumber Daya Lahan Pertanian
Kementerian Pertanian
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 31 Desember 2023

Kepala Balai Besar,



Dr. Ir. Rahmawati, MM
NIP. 196710071994032009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional.....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos-PoS Laporan Realisasi Anggaran.....	15
C. Penjelasan atas Pos-PoS Neraca.....	24
D. Penjelasan atas Pos-PoS Laporan Operasional.....	40
E. Penjelasan atas Pos-PoS Laporan Perubahan Ekuitas.....	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	52
VI. Lampiran dan Daftar.....	55



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114

TELEPON: (0251) 8323011 – 8323012, FAKSIMILI: (0251) 8311256

WEBSITE: www.sdip.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL: bsip_sdip@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2023
Kepala Balai Besar,



Dr. Ir. Rahmawati, MM
NIP. 196710071994032009

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Semeseter II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp315.191.124 atau mencapai 514.60 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp61.250.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp16.009.638.555 atau mencapai 93.61 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp17.102.445.000

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp55.957.124.100 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp7.654.300; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp31.234.402.611; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp24.715.104.156.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp55.951.191.100.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp236.639.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp17.595.628.306 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp17.358.989.306. Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Sebesar Rp.38.199.999; Surplus Kegiatan Non Operasional Rp40.352.125 dan Defisit Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp17.280.437.182.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp58.531.102.461 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp17.280.437.182 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas

sebesar Rp14.706.458.821 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp55.951.191.100.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat,	Tahun 2023				Tahun 2022			
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1								
Pendapatan Perpajakan	B.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1.2	61,250,000	315,191,124	253,941,124	514.60	260,250,000	310,033,384	49,783,384	119
Pendapatan Hibah	B.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah		61,250,000	315,191,124	253,941,124	514.60	260,250,000	310,033,384	49,783,384	119
Belanja	B.2								
Belanja Pegawai	B.2.1	3,594,968,000	3,550,795,816	(44,172,184)	98.77	5,304,092,000	5,138,636,608	(165,455,392)	97
Belanja Barang	B.2.2	13,507,477,000	12,458,842,739	(1,048,634,261)	92.24	10,969,776,000	10,687,242,429	(282,533,571)	97
Belanja Modal	B.2.3	0	0	0	0	19,599,000	19,599,000	0	100
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	B.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	B.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	B.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Lain-Lain	B.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja		17,102,445,000	16,009,638,555	(1,092,806,445)	93.61	16,293,467,000	15,845,478,037	447,988,963	97

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah			Kenaikan (Penurunan)	
	Catatan	2023	2022	Jumlah	%
ASET					
Aset Lancar	C.1				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	0	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	3,000	778,372,735	(778,369,735)	(100.00)
Persediaan	C.1.3	7,651,300	8,781,200	(1,129,900)	(12.87)
Jumlah Aset Lancar		7,654,300	787,153,935	(779,499,635)	(99.03)
Aset Tetap	C.2				
Tanah	C.2.1	13,152,236,000	13,152,236,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	24,043,612,159	26,942,508,364	(2,898,896,205)	(10.76)
Gedung dan Bangunan	C.2.3	19,912,199,153	19,912,199,153	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	958,580,000	958,580,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	337,857,500	337,857,500	0	0.00
Konstruksi Dalam Penggerjaan	C.2.6	0	0	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(27,170,082,201)	(28,274,709,614)	(1,104,627,413)	(3.91)
Jumlah Aset Tetap		31,234,402,611	33,028,671,403	(1,794,268,792)	(5.43)
Piutang Jangka Panjang	C.3				
Piutang Tagihan Tuntutan	C.3.1	0	0	0	0.00
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	0	0	0	0.00
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.3	0	0	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.3.4	0	0	0	0.00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0	0	0.00
Aset Lainnya	C.4				
Aset Tak Berwujud	C.4.1	27,731,174,093	27,731,174,093	-	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2	(3,016,106,904)	(3,015,896,970)	209,934	0,01
Jumlah Aset Lainnya		24,715,067,189	24,715,277,123	209,934	0,00
Jumlah Aset		55,957,124,100	58,531,102,461	2,573,978,361	(4.40)
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek	C.5				
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	0	0	0	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	0	0	0	0,00
Beban Yang Masih Harus di Bayar	C.5.3	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban		-	-	-	0,00
Ekuitas	C.6				
Ekuitas	C.6.1	55,957,124,100	58,531,102,461	2,579,911,361	(4,41)
Jumlah Ekuitas		55,957,124,100	58,531,102,461	2,579,911,361	(4,41)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		55,957,124,100	58,531,102,461	2,573,978,361	(4,40)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kegiatan Operasional					
Pendapatan	D.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1	236,639,000	310,033,000	(73,394,000)	(23.67)
Jumlah Pendapatan		236,639,000	310,033,000	(73,394,000)	(23.67)
Beban	D.2				
Beban Pegawai	D.2.1	3,550,795,816	5,138,636,608	(1,587,840,792)	(30.90)
Beban Persediaan	D.2.2	1,585,598,525	716,266,255	869,332,270	121.37
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	4,874,327,412	5,266,953,212	(392,625,800)	(7.45)
Beban Pemeliharaan	D.2.4	2,400,835,960	2,093,548,792	307,287,168	14.68
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	3,599,210,742	2,603,730,275	995,480,467	38.23
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.2.6	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.2.7	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.8	1,584,859,851	2,317,280,681	(732,420,830)	(31.61)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.9	0	0	0	0
Jumlah Beban		17,595,628,306	18,136,415,823	540,787,517	2,949
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(17,358,989,306)	(17,826,382,823)	467,393,517	2,589
Kegiatan Non Operasional					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.3				
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar	D.3.1	38,199,999	0	38,199,999	
Beban Penjualan Aset Non Lancar	D.3.2	0	0	-	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.4				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.4.1	0	0	-	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.4.2	0	0	-	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.1	40,352,125	384	40,351,741	10.508
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.2	0	0	0	0
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional		78,552,124	384	78,551,740	20,456
Surplus /Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(17,280,437,182)	(17,826,382,439)	545,945,257	(3.06)
Pos Luar Biasa	D.6				
Pendapatan Luar Biasa	D.6.1	0	0	-	
Beban Luar Biasa	D.6.2	0	0	-	
Jumlah Pos Luar Biasa		0	0	-	-
Surplus (Defisit) LO		(17,280,437,182)	(17,826,382,439)	540,012,257	3,029

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Ekuitas Awal	E.1	58,531,102,461	60,476,176,780	1,945,074,319	-
Surplus/Defisit LO	E.2	(17,280,437,182)	(17,826,382,439)	540,012,257	-
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E.3	0	0	-	-
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4				
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.4.3	0	0	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.4	0	0	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.4.5	0	0	-	-
Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		0	0	-	-
Transaksi Antar Entitas	E.5	14,706,458,821	15,881,308,120	1,174,849,299	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(2,579,911,361)	(1,945,074,319)	634,837,042	-
Ekuitas Akhir	E.6	55,951,191,100	58,531,102,461	2,579,911,361	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum Entitas
dan Rencana
Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
2. Pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
3. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
4. Pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
5. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik pertanian;
6. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian

Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konskuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam

laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Pendapatan- LRA

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan LO

Belanja

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perpendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
-------	---	------

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Tetap

Aset c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Panjang

Jangka

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.045.753.000. Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel B.1
Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	61.250.000	61.250.000
Jumlah Pendapatan	61.250.000	61.250.000
Belanja		
Belanja Pegawai	4.030.056.000	3.594.968.000
Belanja Barang	7.265.697.000	13.507.477.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	11.295.753.000	17.102.445.000

Realisasi Pendapatan
Rp315.191.124

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp315.191.124 atau mencapai 515 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp61.250.000. Pendapatan Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan, Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel B.2
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(dalam Rupiah)*

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	8.250.000	48.013.999	581.98
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	53.000.000	198.025.000	373,59
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Infromasi	0	28.800.000	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28.305.000	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12.047.125	100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	61.250.000	315.191.124	515

Realisasi Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 944.69 persen dibandingkan tahun anggaran yang sebelumnya karena adanya penghapusan melalui mekanisme lelang berupa kendaraan dinas senilai Rp38.199.999.

Realisasi Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan mengalami penurunan sebesar 30.18 persen. Hal tersebut karena sempat dihentikannya penerimaan PNBP dikarenakan adanya Surat Edaran dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian perihal tidak diperkenankannya pungutan PNBP atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil sampai disahkanya regulasi turunan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian.

Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi mengalami kenaikan sebesar 61.21 Persen dibandingkan TA 2022. Hal tersebut disebabkan oleh mulai meningkatnya kegiatan dan aktivitas pelaksanaan survey setelah masa Pandemi covid-19 berakhir. Selain itu faktor rampungnya proses transformasi kelembagaan juga turut menjadi katalis tersendiri terhadap meningkatkan

pendapatan tersebut. Selain itu, terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari pendapatan lain-lain yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu. Peningkatan signifikan pengembalian belanja pegawai disebabkan karena adanya pengembalian belanja tunjangan fungsional umum pegawai dengan status tugas belajar dan adanya keterlambatan SK Peralihan jabatan fungsional dua orang pegawai yang menyebabkan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional. Sementara peningkatan pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu disebabkan oleh temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas kelebihan belanja operasional perawatan perkantoran.

*Tabel B.3
Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	48.013.999	4.596.000	944.69
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	198.025.000	283.657.000	(30.18)
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Infomasi	28.800.000	21.780.000	32.23
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	28.305.000	384	7.370.993
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	12.047.125	0	100,00
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0
Jumlah	315.191.124	310.033.384	1.66

Realisasi Belanja
Rp16.009.638.555

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian pada TA 2023 adalah

sebesar Rp16.009.638.555 atau 94% dari anggaran belanja sebesar Rp17.102.445.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel B.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023
(dalam Rupiah)*

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.594.968.000	3.550.795.816	99
Belanja Barang	13.507.477.000	12.458.842.739	92
Belanja Modal	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	17.102.445.000	16.009.638.555	94
Pengembalian Belanja Pegawai	0	(1.080.690)	-
Jumlah	17.102.445.000	16.008.557.865	94

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 1.04 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan oleh:

1. Belanja barang mengalami peningkatan sebesar 19.32 persen disebabkan karena Kegiatan standardisasi yang meliputi kegiatan perumusan Rancangan Standar dan uji coba sudah mulai berjalan sehingga membutuhkan bahan bahan pendukung dilapangan yang lebih banyak dari tahun sebelumnya.

*Tabel B.5
Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)*

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	3.550.795.816	5.138.636.608
Belanja Barang	12.458.842.739	10.687.242.429
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah	16.009.638.555	15.845.478.037

Belanja Pegawai
Rp3.550.795.816

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.550.795.816 dan Rp5.138.636.608. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 30.90 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas dan mutasi ke satuan kerja lain.

Tabel B.6
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	3.550.795.816	5.138.636.608	(30.90)
Belanja Lembur	0	0	(0.00)
Jumlah Belanja Kotor	3.550.795.816	5.138.636.608	(30.90)
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.080.690)	(6.970.678)	(15,50)
Jumlah Belanja	3.549.715.126	5.131.665.930	(30.82)

Pada belanja pegawai, terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional untuk 2 pegawai sebesar Rp51.300.000 dikarenakan adanya peralihan jabatan dari Peneliti menjadi Analis Standardisasi dan Analisis Prasaran dan Sarana Pertanian. Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional tersebut disebabkan karena pada SK Pengangkatan pegawai bersangkutan (TMT September 2022) belum mencantumkan nilai Tunjangan Fungsional sehingga sesuai kesepakatan dari Eselon I, pembayaran Tunjangan fungsional masih menggunakan jabatan lama.

Belanja Barang
Rp12.458.842.739

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.458.842.739 dan Rp10.687.242.429 Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 19.32 persen dari

Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Kenaikan belanja barang tersebut disebabkan karena Kegiatan standardisasi yang meliputi kegiatan perumusan Rancangan Standar dan uji coba sudah mulai berjalan sehingga membutuhkan bahan bahan pendukung dilapangan yang lebih banyak dari tahun sebelumnya.

*Tabel B.7
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Barang Operasional	2.797.189.048	2.951.532.359	(5,23)
Belanja Barang Non Operasional	732.346.968	986.486.460	(25,76)
Belanja Persediaan	1.591.147.425	725.127.850	119,43
Belanja Jasa	1.344.791.396	1.328.934.393	1,19
Belanja Pemeliharaan	2.394.157.160	2.091.431.092	9,26
Belanja Perjalanan Dinas	3.599.210.742	2.603.730.275	38,40
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	12.458.842.739	10.687.242.429	(16,58)
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0
Jumlah Belanja	7.294.949.813	7.325.844.440	(0,42)

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp0

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2022 hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pagu belanja modal ditahun anggaran 2023 dan 2022.

Tabel B.8
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Modal Tanah
Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal tanah pada TA 2023.

Tabel B.9
Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp0, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2022. Meskipun terdapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin, namun anggaran tersebut belum bisa direalisai. Hal ini

disebabkan oleh masih terhambatnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin akibat dari implementasi TKDN. Saat ini Satuan Kerja tengah menunggu surat persetujuan dari Menteri Pertanian terkait belanja modal yang tidak memenuhi standar nilai TKDN.

*Tabel B.10
Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

*Belanja
Gedung
Modal
dan
Bangunan Rp0*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

*Tabel B.11
Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

*Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

*Tabel B.12
Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)*

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Sosial Rp0

Bantuan

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial.

*Tabel B.13
Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Aset Lancar
Rp7.654.300

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.654.300 dan Rp787.153.935.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Bank BRI No. Rek. 650172372421000	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian tidak memiliki rekening untuk menampung pendapatan yang berasal dari PNBP. Setiap dana PNBP yang masuk akan langsung masuk ke kas negara melalui billing penerimaan negara. Bendara penerimaan hanya membuat kode billing setoran dan membukuan setiap transaksi penerimaan

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp3.000

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.000 dan Rp778.372.735.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Setara Kas sebesar Rp. 3.000 merupakan sisa dana hibah yang disetorkan ke kas negara diluar periode pelaporan (bulan Januari 2024) sehingga masih muncul dalam neraca Desember 2023. Sisa Dana tersebut telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 22 Januari 2024 dengan nomor NTPN B5DE27NAP6MMURPG. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Tabel C.2
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2023 dan 2022*

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	3.000	778.372.735
Jumlah	3.000	778.372.735

Saldo kas lainnya dan setara kas tersebut merupakan sisa dana hibah dari kegiatan *Development of Soil Atlas of Asia and National Soil Information of Indonesia* yang terdaftar dengan nomor register 2AGV6S4A. Kegiatan kerja sama antara Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian dengan *Asian Food And Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)* tertuang dalam Perjanjian Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: TCP 04.10.2019. Kegiatan kerjasama tersebut merupakan kegiatan Hibah Multiyear yang berlangsung dari tanggal 1 September 2019 hingga 31 Agustus 2023 dengan nilai kerjasama sebesar USD. 800.000.

*Piutang Bukan Pajak
Rp0*

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.3
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNBP	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

*Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perpendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0*

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.4
Rincian Bagian Lancar TP/TGR
TA 2023 dan 2022*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	TP/TGR	0	-
	Jumlah	0	0

*Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0*

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

*Tabel C.5
Rincian Bagian Lancar TPA TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	TPA	0	0
	Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel C.6
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Beban Dibayar di Muka
Rp0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari

barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel C.7
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Dibayar di Muka	0	0
Jumlah	0	0

*Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0*

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.8
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunna	0	0
Pendapatan Hasik Survey dan Pemetaan	0	0
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi	0	0
Jumlah	0	0

*Persediaan
Rp7.651.300*

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.651.300 dan Rp8.781.200 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.9
Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022*

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	7.455.300	8.781.200
Barang untuk Pemeriharaan	196.000	0
Suku Cadang		0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		0
Persediaan Lainnya		0
Jumlah	7.651.300	8.781.200

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Aset Tetap
Rp31.234.402.611*

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp31.234.402.611 dan Rp33.028.671.403.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

*Tanah
Rp13.152.236.000*

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp13.152.236.000 dan Rp13.152.236.000 Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

*Tabel C.10
Rincian Mutasi Tanah*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Desember 2022	13.152.236.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	0
Revaluasi Aset	0
Penghapusan	0
Saldo Per 31 Desember 2023	13.152.236.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	13.152.236.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

*Tabel C.11
Rincian Tanah TA 2023*

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.0000 m ²	Jl Pahlawan, Dreded	7.306.338.000
2	1.600 m ²	Desa Laladon RT 01 RW 04	4.872.960.000
3	320 m ²	Desa Laladon RT 01 RW 04	972.938.000
Jumlah			13.152.236.000

Peralatan dan Mesin
Rp24.043.612.159

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp24.043.612.159 dan Rp26.942.508.364

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Tabel C.12
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	26.942.508.364
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Transfer Masuk	253.326.500
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang:	0
Penghentian aset dari penggunaan	2.521.561.705
Transfer Keluar	630.661.000
Saldo Per 31 Desember 2023	24.043.612.159
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(22.718.572.623)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	1.325.039.536

Mutasi tambah selama periode pelaporan merupakan Transfer Masuk dari Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian berupa kendaraan dinas senilai 253.326.500 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor B-787.1/PL.310/H.8.4/7/2023 Tanggal 25 Juli 2023.

Sementara untuk Mutasi kurang merupakan transfer keluar dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian ke Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian berupa kendaraan dinas dan Laptop berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor:

B-936/PL.310/H.8/05/2023 Tanggal 12 Mei 2023 dengan nilai sebesar Rp322.065.000.

Transfer keluar dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian ke Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk berupa Soil Test berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: B-1854/PL.330/H.8/08/2023 Tanggal 01 Agustus 2023 dengan nilai sebesar Rp308.596.000.

Rincian Transfer Keluar pertanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel C.13
Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin TA 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	Nilai
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	297.290.000
Laptop	24.775.000
Soil Test	308.596.000
Nilai Transfer Keluar	630.661.000

Penghentian penggunaan sebuah kendaraan Dinas Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp67.906.500 serta peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp2.453.655.205 dan telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya.

Saat ini, BMN berupa Kendaraan dinas telah dilakukan lelang pada tanggal 25 Juli 2023 dan telah terjual seharga Rp38.199.999 Berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1251/32/2023 Tanggal 27 Juli 2023. Saat ini BMN tersebut telah diajukan untuk proses penetapan penghapusan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan surat permohonan Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara Nomor B-2092/PL.330/H.8/8/2023 Tanggal 25 Agustus 2023. Sementara peralatan dan mesin lainnya telah diajukan permohonan penghapusan dan masih dalam proses penetapan di Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp19.912.199.153

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp19.912.199.153 dan Rp19.912.199.153.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel C.14
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023
(dalam rupiah)*

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	19.912.199.153
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	0
Saldo Per 31 Desember 2023	19.912.199.153
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(3.643.952.117)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	16.268.247.036

Tidak terdapat Transaksi penambahan ataupun pengurangan Gedung dan Bangunan selama periode pelaporan.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp958.580.000*

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp958.580.000 dan Rp958.580.000 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.15
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)*

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	958.580.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0
Mutasi Kurang:	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo Per 31 Desember 2023	958.580.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(807.557.461)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	213.142.343

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan selama periode Pelaporan.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Aset Tetap Lainnya
Rp337.857.500*

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap

Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp337.857.500 dan Rp337.857.500 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

*Tabel C.16
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	337.857.500
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 31 Desember 2023	337.857.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(0)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	337.857.500

Rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
Buku Lainnya	46 Unit	20.601.000
Laporan	35 Unit	37.950.000
Peta Digital	24 Unit	204.812.500
Peta (Map)	10 Unit	53.310.000
Jumlah	115 Unit	337.857.500

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) selama periode pelaporan.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp27.170.082.201

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.170.082.201 dan Rp28.274.709.614.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

*Tabel C.17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	24.043.612.159	22.718.572.623	1.325.039.536
2.	Gedung dan Bangunan	19.912.199.153	3.643.952.117	16.268.247.036
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	958.580.000	807.557.461	151.022.539
4.	Aset Tetap Lainnya	337.857.500	0	337.857.500
	Jumlah	45.252.248.812	27.170.082.201	18.082.166.611

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Piutang Jangka Panjang
Rp0*

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Piutang Jangka Panjang pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian selama periode pelaporan.

*Piutang Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0*

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaianya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Tabel C.18
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	-	0	0
	Jumlah	0	0

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 13 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) selama periode pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Tabel C.19
Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	-	0	0
	Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

*Tabel C.20
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang
TA 2023*

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0		0
Tagihan TPA			
Lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	-	0%	0
Macet	-	0%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Aset Lainnya
Rp27.731.174.093

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp27.731.174.093 dan Rp27.731.174.093. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp27.731.174.093

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp27.731.174.093 dan Rp27.731.174.093.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian berupa Hak Cipta Golongan I, *software*, Hasil Kajian/Penelitian dan Peta RBI skala Menengah yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

*Tabel C.21
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	27.731.174.093
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Saldo Per 31 Desember 2023	27.731.174.093
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(3.016.106.904)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	24.715.067.189

Tidak terdapat transaksi penambahan maupun pengurangan aset tak berwujud selama periode pelaporan. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel C.22
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Hak Cipta Golongan I	5.175.000
2.	Software Komputer	3.012.687.229
3.	Hasil Kajian/Penelitian	24.710.591.864
4.	Peta RBI Skala Menengah	2.720.000
	Jumlah	27.731.174.093

Aset Lain-Lain
Rp2.521.561.705

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.521.561.705 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

*Tabel C.23
Rincian Mutasi Aset Lain-lain*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	2.521.561.705
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	(2.521.561.705)
Saldo Per 31 Desember 2023	0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(0)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah dari reklasifikasi peralatan dan mesin yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp2.521.561.705.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp3.016.106.904

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.016.106.904 dan Rp3.015.724.003. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel C.24
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A. Aset Tak Berwujud				
1.	Hak Cipta Golongan I	5.175.000	699.675	4.512.292
2.	Software Komputer	3.012.687.229	3.012.687.229	0
3.	Hasil Kajian/Penelitian	24.710.591.864	0	24.710.591.864
4.	Peta RBI Skala Menengah	2.720.000	2.720.000	0
Jumlah		27.731.174.093	3.016.106.904	24.715.067.189
B. Aset Lain-lain		0	0	0
Jumlah		0	0	0
Total		27.731.174.093	3.016.106.904	24.715.067.189

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka Pendek Rp0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai Besar Pengujian Standar

Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Tabel C.25
Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2023
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Nilai
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-
Jumlah		-

*Uang Muka dari KPPN
Rp0*

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel C.26
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Jumlah
1.	-	-
2.	-	-
Total		-

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagai berikut:

*Tabel C.27
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah
-	0
Jumlah	0

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp384.927.292 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel C.28
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	2023	2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	0	0

Ekuitas Rp55.951.191.100

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp55.951.191.100 dan Rp58.531.102.461. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP Rp
236.639.000

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp236.639.000 dan Rp310.033.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel D.1
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	9.814.000	4.596.000	113.53
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	90.737.000	283.657.000	(68.01)
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Infomasi	28.800.000	21.780.000	32.23
Jumlah	236.639.000	310.033.000	(23.67)

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan, dan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Infomasi.

Penurunan pendapatan per 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan karena adanya Surat Edaran dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian perihal tidak diperkenakkannya pungutan PNBP atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil sampai disahkanya regulasi turunan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian yang masih dalam tahap harmonisasi

Terdapat perbedaan pendapatan pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang berasal dari Penerimaan Pengembalian Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun Anggaran Yang lalu sebesar Rp40.352.125 dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 38.199.999.

Beban Pegawai
Rp
3.550.795.816

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.550.795.816 dan

Rp5.138.636.608 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel D.2
Rincian Beban Pegawai
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	3.550.795.816	5.138.636.608	(30.78)
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0,00
Beban Lembur	0	0	0,00
Jumlah Beban	3.550.795.816	5.138.636.608	(30.90)

Beban pegawai tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 30.90 persen dibandingkan tahun 2022 hal tersebut disebabkan oleh:

1. Adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas dan mutasi ke satuan kerja lain.

*Beban
Persediaan
Rp1.585.598.525*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.585.598.525 dan Rp716.266.255. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.3
Rincian Beban Persediaan
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.374.870.325	634.888.255	116.55
Beban Persediaan Bahan Baku	191.356.700	67.188.000	184.81
Beban Persediaan Lainnya	19.371.500	14.190.000	36.52

Jumlah Beban	1.585.598.525	716.266.255	121.37
---------------------	----------------------	--------------------	---------------

Beban persediaan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 121.37 persen dibandingkan tahun 2022, hal tersebut disebabkan meningkatnya kebutuhan barang persediaan seiring dimulainya kegiatan standardisasi.

Beban Persediaan pada Laporan Operasional senilai Rp1.585.598.525 tidak sama dengan Transaksi Pemakaian yang tercantum dalam Laporan Persediaan sebesar Rp1.592.277.325, hal tersebut dikarenakan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan senilai Rp4.394.000 dan Beban Persediaan suku cadang senilai Rp2.284.800 tidak masuk dalam Laporan Operasional

*Beban Barang
dan Jasa Rp
4.874.327.412*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.874.327.412 dan Rp5.266.953.212. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian aset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

Secara keseluruhan beban barang dan jasa mengalami penurunan sebesar 7.45 persen.

*Tabel D.4
Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	2.579.827.176	2.523.235.300	2.24
Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	0	7.893.000	(100,00)
Beban Pengiriman	7.141.300	7.185.000	(0.61)

Surat Dinas Pos			
Beban Honor Operasional Satker	120.048.000	152.442.000	(21.25)
Beban Barang Operasional Lainnya	69.622.500	73.502.500	(5,43)
Beban Bahan	376.356.198	171.894.710	118.95
Beban Langganan Listrik	876.715.073	815.663.304	7.48
Beban Langganan Telepon	3.118.258	9.329.134	(66.58)
Beban Langganan Air	32.578.065	23.088.955	41.10
Beban Sewa	133.180.000	412.460.000	(96,54)
Beban Jasa Profesi	299.200.000	60.500.000	391,69
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	306.350.770	785.435.250	(61.00)
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	20.550.072	195.167.559	(89,47)
Beban Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-19	0	14.996.500	(100,00)
Beban Honor Output Kegiatan	49.640.000	14.160.000	250.56
Jumlah Beban	4.874.327.412	5.266.953.212	(7.45)

*Beban
Pemeliharaan
Rp2.400.835.960*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.400.835.960 dan Rp2.093.548.792. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 14.68 persen dibandingkan tahun 2022. Kenaikan beban pemeliharaan tersebut karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk perawatan atas gedung dan bangunan dan juga kendaraan dinas. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.5
Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.642.681.664	1.371.289.133	19.79
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	751.475.496	720.141.959	4.35
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	4.394.000	2.117.700	107.49
Beban Persediaan Suku Cadang	2.284.800	0	100,00
Jumlah Beban	2.400.835.960	2.093.548.792	14.68

Beban Perjalanan Dinas Rp 3.599.210.742

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.599.210.742 dan Rp2.603.730.275. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat seiring dengan mulai berjalannya kegiatan standardisasi Sumber Daya Lahan dan Perubahan Iklim. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6
Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.172.541.714	2.206.228.400	43.80
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.950.000	151.731.875	(87.51)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	407.719.028	245.770.000	65.89
Jumlah Beban	3.599.210.742	2.603.730.275	38.23

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Masyarakat Rp0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.7
Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat TA
2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.8
Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 1.584.589.851

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp91.584.589.851 dan Rp2.317.280.681.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan

untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.9
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	906.825.342	1.616.174.353	(43,88)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	553.484.966	576.520.785	(4,00)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	124.239.609	124.239.609	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	39,31
Jumlah Penyusutan	1.584.649.917	2.316.934.747	(31.61)
Beban Amortisasi Hak Cipta	73.934	73.934	0,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	136.000	272.000	0,00
Jumlah Amortisasi	209.934	345.934	0,00
Jumlah Beban	1.584.859.851	2.317.280.681	(31.61)

*Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.10
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

*Kegiatan Non
Operasional
Rp78.552.124*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Peningkatan dari surplus Kegiatan Non Operasional pada tahun 2023 disebabkan karena adanya penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas melalui mekanisme lelang, serta adanya pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel D.11
Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Penjualan Alat Kantor	38.199.999	0	-
Selisih Kurs	0	0	0,00
Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	28.305.000	384	10.508
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	12.047.125	0	-
Jumlah Beban	78.552.124	384	20.456

*Pos Luar Biasa
Nihil*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp
58.531.102.461

Defisit LO

Rp17.280.437.182

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp0

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp58.531.102.462 dan Rp60.476.176.780.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp17.280.437.182 dan Rp17.826.382.439. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel E.1
Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023
(dalam Rupiah)

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
Jumlah		0

*Selisih Revaluasi
Aset Rp0*

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Revaluasi aset pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian terakhir dilakukan pada tahun 2019.

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp0*

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah koreksi nilai yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

*Tabel E.2
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023
(dalam Rupiah)*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

*Koreksi Lain-lain
Rp0*

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

*Tabel E.3
Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023
(dalam Rupiah)*

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

*Transaksi Antar
Entitas
Rp14.706.458.821*

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp14.706.458.821 dan Rp15.881.308.120.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Tabel E.4
Transaksi Antar Entitas TA 2023*

(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(315.191.124)
Ditagihkan ke Entitas Lain	14.941.918.570
Transfer Masuk	(0)
Transfer Keluar	(209.618.875)
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	289.350.250
Jumlah	14.706.458.821

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Diterima dari Entitas Lain Rp315.191.124 dan Ditagihkan ke Entitas Lain Rp14.941.918.570

Transfer Masuk/Transfer Keluar Rp209.618.875

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp315.191.124 sedangkan DKEL sebesar Rp14.941.918.570.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp209.618.875 terdiri dari:

*Tabel E.5
Transfer Keluar TA 2023*

(dalam Rupiah)

No.	Jenis	Entitas Penerima	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1.	Minibus	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	297.290.000	0
2.	Laptop	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	24.775.000	3.096.875
3.	Soil Test	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	308.596.000	206.522.000
Jumlah			630.661.000	209.618.875

Sedangkan Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0. Tidak terdapat transaksi Transfer Masuk selama periode pelaporan.

Pengesahan
Hibah Langsung
dan
Pengembalian
Hibah Langsung
Rp289.350.250

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp289.350.250 dari total Rp289.350.250 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel E.6
Pengesahan Hibah Langsung TA 2023
(dalam Rupiah)

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	ACIAR	Uang Tunai	289.350.250
Total Pengesahan			289.350.250
Pengesahan Pengembalian Hibah			0
Jumlah			289.350.250

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Ekuitas Akhir Rp
55.951.191.100*

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp55.951.191.100 dan Rp58.884.834.385

Kejadian Setelah
Tanggal Neraca

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Terdapat pengembalian sisa dana Hibah kegiatan *Development of Soil Atlas of Asia and National Soil Information of Indonesia* dengan nomor register 2AGV6S4A sebesar Rp3.000 ke kas negara pada tanggal 22 Januari 2024. Penyetoran tersebut baru dilakukan diluar periode pelaporan karena terkendala oleh proses revisi DIPA hibah. Setoran tersebut tercatat dengan nomor NTPN B5DE27NAP6MMURPG.

Informasi
Rekening Satuan
Kerja

F.2 Pengungkapan Lain-lain

1. Informasi Rekening Satuan Kerja

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, maka Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian telah melaporkan laporan bulanan terkait dengan rekening yang dikelolanya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah.

Selama tahun 2023, satuan kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian mengelola 5 rekening yang terdiri dari 1 rekening Bendahara Pengeluaran (Virtual Account) dan 4 rekening penampungan lainnya untuk menampung dana hibah dan kerjasama (Kemitraan). Rincian rekening pemerintah yang dikelola satuan kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel F.1
Rincian Rekening Satuan Kerja

No. Rekening	Nama Rekening	Surat Ijin	
		Nomor	Tanggal
65017237242 1000	BPG 023 BALAI BPSI SDLP	S-1253/WPB.12/KP.05/2020	25-06-2020
00120100385 7306	RPL 140 PDHL BBSSDL UNTUK 2AGV6S4A	000016	16-09-2020
00120100401 6301	RPL 140 PDHL BBSSDL UNTUK 2W2H8PD	000095	25-01-2021
00120100476 8306	RPL 023 KS BBPSISDLP UTK JAGUNG	000331	11-09-2023
00120100479 0303	RPL PDHL UNTUK 2227WN8A	000411/140	09-11-2023

Asian Food and
Agriculture
Cooperation
Initiative

Crop Health and
Nutrient
Management of
Shallot-Chilli-Rice
Cropping System
in Coastal
Indonesia

Kemitraan

2. Hibah

a. Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)

Pada tahun 2019, terdapat hibah pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sunber Daya Lahan Pertanian yaitu kegiatan Development of the Soil Atlas of Asia and National Soil Information of Indonesia. Adapun pendonor hibah tersebut adalah Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) International Technologi Cooperation Center RDA, 300 Nongsaengmyeong-ro, Doekjin-gu Jeonju-si, 54875 Republic of Korea. Nomor register kegiatan hibah adalah 2AGV6S4A dan telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan surat nomor S-575/PR.8/2019 tanggal 21 Oktober 2019. Jangka waktu pelaksanaan hibah AFACI ini adalah selama 4 (empat) tahun, dimulai pada tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan 31 Agustus 2023 senilai 80.000 USD. Pada tahun 2019 telah dilakukan pengesahan dana hibah sebesar Rp. 64.329.000,- tahun 2020 sebesar Rp. 214.970.000,- tahun 2021 sebesar Rp. 855.214.971,- tahun 2022 sebesar Rp. 465.000.000,- serta tahun 2023 sebesar Rp. 464.998.218

b. Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chilli-Rice Cropping System in Coastal Indonesia

Pada tahun 2020 terdapat hibah pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian yaitu Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chilli-Rice Cropping System in Coastal Indonesia. Nomor register kegiatan hibah adalah 2W2H8PDA dan telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan surat nomor: S-5/PR.8/2021 Tanggal 6 Januari 2021. Perjanjian kerjasama hibah dengan ACIAR tersebut tertuang dalam MoU Nomor: SLAM/2018/145/237242. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah dilakukan pengesahan dana hibah sebesar Rp. 1.866.771.701.

3. Kegiatan Kerjasama

Pada bulan Agustus 2023, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian menjalin kegiatan kemitraan dengan Unit Eselon I Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam kegiatan Pendampingan *Food Estate* Jagung Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kegiatan dengan pagu anggaran Rp500.000.000 ini meliputi Koordinasi pelaksanaan Pendampingan *Food Estate* Jagung Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Terkelolanya lahan kering dilokasi *Food Estate*, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendampingan *Food Estate* Jagung

Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

*Perubahan
Pejabat Pengelola
Keuangan*

4. Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Nomor: B-884/OT.050/H.8/05/2023 Tanggal 12 Mei 2023 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Nomor B-788/OT.050/H.8/04/2023 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2023

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Husnain, SP., MP., Ph.D
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Wahyu Wahdini, SE., MM
Pejabat Penandatangan SPM	:	Aris Dwi Saputra, SE
Bendahara Pengeluaran	:	Haryani, SE
Bendahara Penerimaan	:	Tedy Januar, SE
Operator Pelaporan	:	Wiwit Winarto, A.Md
Operator BMN	:	Teguh Mulyono, SM
Operator Persediaan	:	Teguh Mulyono, SM

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Dr. Ir Rahmawati, MM
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Aris Dwi Saputra, SE
Pejabat Penandatangan SPM	:	Anik Hastuti,SP.,MM
Bendahara Pengeluaran	:	Haryani, SE
Bendahara Penerimaan	:	Tedy Januar, SE
Operator Pelaporan	:	Teguh Mulyono, SM
Operator Pelaporan	:	Wiwit Winarto, A.Md
Operator BMN	:	Tulus Arizon, A.Md
Operator Persediaan	:	Nurmani, A.Md

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018

ESelon I : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 09

SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN 237242

Tgl Data : 26/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 26/01/24 10:13 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018

ESELON I : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN 09

SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN 237242

Tgl Data : 26/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 26/01/24 10:13 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023					2022				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	17,102,445,000	16,009,638,555	(1,092,806,445)	94	16,293,467,000	15,845,478,037	(447,988,963)	97		
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bogor, 26 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DR. IR. RAHMAWATI, M.M

196710071994032009

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237242) BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Tgl Data : 26/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 26/01/24 10:13 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASSET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,000	778,372,735	(778,369,735)	(100.00)
Persediaan	7,651,300	8,781,200	(1,129,900)	(12.87)
JUMLAH ASSET LANCAR	7,654,300	787,153,935	(779,499,635)	(99.03)
ASSET TETAP				
Tanah	13,152,236,000	13,152,236,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	24,043,612,159	26,942,508,364	(2,898,896,205)	(10.76)
Gedung dan Bangunan	19,912,199,153	19,912,199,153	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	958,580,000	958,580,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	337,857,500	337,857,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(27,170,082,201)	(28,274,709,614)	1,104,627,413	(3.91)
JUMLAH ASSET TETAP	31,234,402,611	33,028,671,403	(1,794,268,792)	(5.43)
ASSET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	27,731,174,093	27,731,174,093	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASSET LAINNYA	(3,016,106,904)	(3,015,896,970)	(209,934)	0.01
JUMLAH ASSET LAINNYA	24,715,067,189	24,715,277,123	(209,934)	(0.00)
JUMLAH ASSET	55,957,124,100	58,531,102,461	(2,573,978,361)	(4.40)

EKUITAS				
Ekuitas	55,957,124,100	58,531,102,461	(2,573,978,361)	(4.40)
JUMLAH EKUITAS	55,957,124,100	58,531,102,461	(2,573,978,361)	(4.40)
JUMLAH EKUITAS	55,957,124,100	58,531,102,461	(2,573,978,361)	(4.40)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	55,957,124,100	58,531,102,461	(2,573,978,361)	(4.40)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bogor, 26 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DR. IR. RAHMAWATI, M.M
196710071994032009

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237242) BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Tgl Data : 26/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 26/01/24 10:12 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0		0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0		0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0		0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0		0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0		0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0		0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0		0
Pendapatan Cukai	0	0		0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0		0
Pendapatan Bea Masuk	0	0		0
Pendapatan Bea Keluar	0	0		0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0		0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0		0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0		0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0		0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	236,639,000	310,033,000	(73,394,000)	(23.673)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	236,639,000	310,033,000	(73,394,000)	(23.673)
PENDAPATAN HIBAH	0	0		0
Pendapatan Hibah	0	0		0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0		0
Jumlah Pendapatan	236,639,000	310,033,000	(73,394,000)	(23.673)
BEBAN OPERASIONAL	0	0		0
Beban Pegawai	3,550,795,816	5,138,636,608	(1,587,840,792)	(30.9)
Beban Persediaan	1,585,598,525	716,266,255	869,332,270	121.37
Beban Barang dan Jasa	4,874,327,412	5,266,953,212	(392,625,800)	(7.455)
Beban Pemeliharaan	2,400,835,960	2,093,548,792	307,287,168	14.678
Beban Perjalanan Dinas	3,599,210,742	2,603,730,275	995,480,467	38.233
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0		0
Beban Bunga	0	0		0

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237242) BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Tgl Data : 26/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 26/01/24 10:12 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,584,859,851	2,317,280,681	(732,420,830)	(31.607)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0
Beban Transfer	0	0	0	0
Beban Lain-Lain	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN	17,595,628,306	18,136,415,823	(540,787,517)	(2.982)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(17,358,989,306)	(17,826,382,823)	467,393,517	(2.622)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	38,199,999	0	38,199,999	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	38,199,999	0	38,199,999	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	40,352,125	384	40,351,741	10,508, 265.88
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	40,352,125	384	40,351,741	10,508, 265.88
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	78,552,124	384	78,551,740	20,456, 182.29
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(17,280,437,182)	(17,826,382,439)	545,945,257	(3.063)
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(17,280,437,182)	(17,826,382,439)	545,945,257	(3.063)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bogor, 26 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DR. IR. RAHMAWATI, M.M
196710071994032009

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237242) BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Tgl Data : 26/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 26/01/24 10:12 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	58,531,102,461	60,476,176,780	(1,945,074,319)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(17,280,437,182)	(17,826,382,439)	545,945,257	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	14,706,458,821	15,881,308,120	(1,174,849,299)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,573,978,361)	(1,945,074,319)	(628,904,042)	-
EKUITAS AKHIR	55,957,124,100	58,531,102,461	(2,573,978,361)	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bogor, 26 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DR. IR. RAHMAWATI, M.M
 196710071994032009

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)



TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237242) BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Tgl Data : 26/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 26/01/24 10:13 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	3,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	7,455,300	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	196,000	0
0.0	131111	Tanah	13,152,236,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	24,043,612,159	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	19,912,199,153	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	924,217,000	0
0.0	134112	Irigasi	34,363,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	337,857,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	22,718,572,623
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,643,952,117
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	800,988,067
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	6,569,394
0.0	162121	Hak Cipta	5,175,000	0
0.0	162151	Software	3,012,687,229	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	24,710,591,864	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	2,720,000	0
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	699,675
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,012,687,229
0.0	169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	2,720,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	14,941,918,570
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	315,191,124	0
0.0	313211	Transfer Keluar	209,618,875	0
0.0	391111	Ekuitas	0	58,531,102,461
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	289,350,250
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	38,199,999
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	9,814,000
3.0	425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	107,288,000
3.0	425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	90,737,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	28,800,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,305,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,047,125
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,497,625,060	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	40,662	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	187,546,470	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	35,651,038	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	38,020,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	235,464,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)



TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237242) BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Tgl Data : 26/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 26/01/24 10:13 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	11,866,718	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	130,211,160	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	323,491,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	82,000,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	5,933,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	48	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	296,650	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	59,330	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,080,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	289,680	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,221,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,579,827,176	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,141,300	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	120,048,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	69,622,500	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,550,072	0
3.0	521211	Beban Bahan	376,356,198	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	49,640,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	306,350,770	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	876,715,073	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,118,258	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	32,578,065	0
3.0	522141	Beban Sewa	133,180,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	299,200,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,642,681,664	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	751,475,496	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	3,172,541,714	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,950,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	407,719,028	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	906,925,342	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	553,484,966	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	123,228,933	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irrigasi	1,010,676	0
3.0	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	73,934	0
3.0	592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	136,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,374,870,325	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4,394,000	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	2,284,800	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)



TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237242) BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Tgl Data : 26/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 26/01/24 10:13 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	191,356,700	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	19,371,500	0
JUMLAH			104,263,751,510	104,263,751,510

Keterangan :

Bogor, 26 Januari 2024

BELUM FINAL

Penanggung Jawab UAKPA

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Kuasa Pengguna Anggaran

DR. IR. RAHMAWATI, M.M

196710071994032009

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237242) BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Tgl Data : 26/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 26/01/24 10:13 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	16,009,638,555
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	315,191,124	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	38,199,999
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	9,814,000
3.0	425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	107,288,000
3.0	425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	90,737,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	28,800,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,305,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,047,125
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,497,625,060	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,352	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	187,546,470	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	35,651,038	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	38,020,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	235,464,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	11,866,718	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	130,211,160	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	323,491,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	83,080,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	5,933,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	48	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	296,650	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	59,330	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,080,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	289,680	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,221,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,579,827,176	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,141,300	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	120,048,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	69,622,500	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,550,072	0
3.0	521211	Belanja Bahan	376,356,198	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	49,640,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	306,350,770	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,591,147,425	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	876,715,073	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,118,258	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	32,578,065	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (237242) BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Tgl Data : 26/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 26/01/24 10:13 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Belanja Sewa	133,180,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	299,200,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,642,681,664	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	751,475,496	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	3,172,541,714	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,950,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	407,719,028	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	690
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,080,000
JUMLAH			16,325,910,369	16,325,910,369

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bogor, 26 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DR. IR. RAHMAWATI, M.M

196710071994032009

1. Kertas Kerja Telaah LK Tingkat UAKPA (PMK 232 Tahun 2022)

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TA 2023**

Kode dan Nama UAKPA : Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
 Kode dan Nama UAPPAW : 0200 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat
 Kode dan Nama Eselon 1 : (09) BSIP
 Kode dan Nama K/L : (018) Kementerian Pertanian

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan				
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada

KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI

	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama

Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama

PENGECEKAN PADA MONSAKTI

	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah

	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓	Tidak
a.	Pagu/DIPA		✓	Tidak
b.	Estimasi PNBP		✓	Tidak

c. Belanja		✓	Tidak
d. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
e. Pendapatan		✓	Tidak
f. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
g. Kas BLU		✓	Tidak
h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓	Tidak
i. Kas Hibah		✓	Tidak
j. Pengesahan Hibah Langsung		✓	Tidak
Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1 Terdapat Selisih Rekon Internal		✓	Tidak
Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di		✓	Ada/Tidak
2 Adakah akun "Belum Deregister"? (untuk LK Tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
3 Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4 Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5 Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6 Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak

PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL

Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual			✓	Tidak
2. Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas			✓	Tidak
3. Terdapat Saldo bernilai desimal			✓	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		Ya	Tidak	Seharusnya
1 Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)		✓		Ya
2 Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		✓		Ya
3 Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)		✓		Ya
4 Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		✓		Ya
5 Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		✓		Ya
6 Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		✓		Ya
7 Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		✓		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada		Ya	Tidak	Seharusnya
1 Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			✓	Ada/Tidak
2 Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari			✓	Tidak
3 Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka			✓	Tidak
4 Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			✓	Tidak
5 Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"			✓	Tidak
6 Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			✓	Tidak
7 Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			✓	Tidak
8 Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)			✓	Tidak
9 Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN			✓	Tidak
10 Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)			✓	Tidak
11 Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban			✓	Tidak
12 Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)			✓	Tidak
13 Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang			✓	Tidak
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1 Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"			✓	Tidak
2 Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)			✓	Tidak
3 Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			✓	Tidak
4 Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			✓	Tidak

	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada) Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah		✓ Ada/Tidak
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu	✓	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		✓ Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓ Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		✓ Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di		Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal		
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	✓	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		✓ Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada		Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		✓ Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk		Ya/Tidak
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai	Ya	Tidak
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	✓	Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA		
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	✓	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	✓	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	✓	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?	✓	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	✓	Ya
8	Terdapat saldo bermilai desimal	✓	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos-pos LO			Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)			✓	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN			✓	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null			✓	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	✓			Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat			✓	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar			✓	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			✓	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan Pos-pos LPE			Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓			Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		✓		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset". Bila ada, cek		✓		Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓		Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas			Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?				Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas				Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)

Pengecekan Pos-pos LRA/B/P			Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		✓		Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		✓		Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		✓		Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		✓		Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓		Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan		✓		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja	-	-		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika			Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		✓		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		✓		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	✓			Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	✓			Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	✓			Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	✓			Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	✓			Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓			Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓			Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		✓		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		✓		Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos			Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		✓		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-		Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		✓		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-		Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus			Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		✓		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	✓			Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		✓		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		✓		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	✓			Ya/Tidak

- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	✓		Ya/Tidak
5 Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	✓		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1 Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?				Ya
2 Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bermilai minus?				Tidak
3 Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?				Ya
4 Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,				Ya
5 Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA				Ya
6 Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,				Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1 Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213				Ya
2 Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?				Ya
3 Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca				Ya
4 Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca				Ya
5 Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca				Ya
6 Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca				Ya
7 Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan				Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

- 1 To do List, Monitoring dan rekon internal sudah Ok
- 2 CaLK sudah dibuat saat verifikasi
- 3 ada sisa hibah yang sudah disetor ke kas negara sebesar 3.000 pada januari 2024
- 4 ATB yang secara nilai kemanfaatan ekonomis sudah tidak ada dan bermilai buku nol untuk di proses penghapusan dari neraca agar meningkatkan akuntabilitas Laporan Keuangan
- 5 ada akun utang kepada pihak ketiga akibat kesalahan sistem agar dijelaskan di CaLK

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Teguh Mulyono

Bogor,
Penelaah,



(AGUNG ARIYANTO)
NIP. 198101812009121004